

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, pelaporan keuangan sangat diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan serta disusun dengan mengikuti standard akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum.

Akuntabilitas menjadi tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, maka salah satu dilakukan adalah menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu kepada pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Perhatian masyarakat Indonesia terus meningkat terhadap masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN). Setiap kebijakan pemerintah dituntut transparansi supaya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diwujudkan demi

tercapainya kehidupan yang berkeadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Banyaknya kasus KKN yang terjadi selama ini di dalam organisasi pemerintah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kesungguhan dan kinerja pemerintah. Anggaran yang memiliki banyak fungsi di dalam jalannya kegiatan pemerintah, seharusnya menjadikan aparat pemerintah melakukan yang terbaik. Keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah terhadap penyusunan dan penggunaan anggaran sangat diharapkan oleh masyarakat.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjaditanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk memintapertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwasalah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan dan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan adalah upaya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan harus disusun sesuai Standard Akuntansi Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ketepatan waktu. Ketepatan waktu merupakan kualitas yang berkaitan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan.

Menurut Mardiasmo: **“Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik serta untuk menghindar ritertundanya pengambilan keputusan tersebut”**.¹⁶

Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan.

Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan maka perlu disajikan lebih awal.

Hal yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah dan keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan Teknologi Informasi. Teknologi Informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Informasi yang tepat waktu yaitu informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat.

1. Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Ke Empat: ANDI, Yogyakarta, 2009

Bila informasi terlambat dalam penyampaiannya, maka akan berdampak fatal dalam pengambilan keputusan bagi organisasi.

Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

Secara umum teknologi adalah suatu pengembangan dari aplikasi atau alat, baik berupa mesin, material hingga proses yang membantu pekerjaan dan menyelesaikan masalah. Jadi secara umum teknologi informasi adalah teknologi yang bermanfaat untuk mengolah data, memproses, menyusun, mengatur, mendapatkan dan menyelesaikan manipulasi data yang menghasilkan informasi berkualitas dan akurat.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No 11 Tahun 2001 tentang Keuangan Daerah.

Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang

disajikan melalui teknologi yang dipakai. Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi pemerintah daerah yaitu:

- a. Belum adanya dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran/ arus data sejak data mentah sampai dengan informasi tercetak.
- b. Untuk perawatan mesin atau perangkat keras, organisasi masih menggantung sendiri kepada pihak pemasok dengan sistem kontrak tahunan. Akibatnya kalau ada kerusakan-kerusakan teknis, sekalipun sangat sederhana, tidak bisa segera diatasi sendiri oleh para pegawai.

Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Dinas Sosial Sumatera Utara.**

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini dilakukan untuk mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang terfokus secara sistematis, berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan di dinas sosial ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu dan keterandalan pelaporan keuangan daerah.
2. Bagi Dinas Sosial Sumatera Utara, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang menghasilkan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu.
3. Bagi Akademis, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi

Akuntansi merupakan kegiatan untuk mencatat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, mengolah transaksi tersebut, menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang berhak, dan menginterpretasikan informasi atas laporan atau informasi yang diterima, sehingga dapat diambil suatu keputusan yang baik.

Menurut Wing Wahyu Winarno (2006) **Akuntansi adalah proses mencatat dan mengolah data transaksi dan menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan.**

Agar perusahaan dapat mencatat transaksi akuntansi dengan baik, maka perlu disiapkan berbagai prosedur pencatatan dan sarana pendukungnya. Masing-masing transaksi memiliki karakteristik sendiri-sendiri, misalnya ada yang berhubungan dengan penerimaan kas, ada yang berhubungan dengan pengeluaran kas, ada yang berhubungan dengan pemindahan barang, dan lain-lain.

Menurut Wing Wahyu Winarno (2006) **Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berfungsi menerima *input*(masukan), mengolah *input*, atau dari lingkungan sistem tersebut berada.** Oleh karenanya, sistem akan berinteraksi dengan lingkungannya.¹⁷

Sistem yang mampu berinteraksi dengan lingkungannya akan mampu bertahan lama. Sistem yang tidak cepat berinteraksi dengan lingkungannya tidak akan bertahan lama.

Menurut Wing Wahyu Winarno (2006) **Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan. Data adalah representasi suatu objek.** Data yang belum diolah belum dapat digunakan untuk pembuatan keputusan. Agar dapat menggambarkan objek yang diwakilinya, data harus dipilih yang paling sesuai.

Dari beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya tentang akuntansi dan sistem informasi akuntansi, maka peneliti menilai bahwa sistem dan teknologi informasi berperan penting dalam aktivitas operasional perusahaan/organisasi. Sistem dan teknologi informasi sangat berperan dalam bidang akuntansi untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan, sehingga apabila sistem dan teknologi informasi baik akan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan sekaligus mampu mencegah dan mendeteksi kesalahan dalam aktivitas operasi perusahaan/organisasi. Dengan demikian adanya pemanfaatan sistem dan

2.Op.cit

teknologi informasi maka perusahaan/organisasi publik/pemerintah akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

2.1.2 Pengolahan Data dan Pengolahan Informasi

Data merupakan bahan baku informasi. Data adalah fakta yang belum berguna bagi pembuat keputusan. Agar berguna, data harus diolah, sehingga menjadi informasi. Data mewakili suatu objek (benda, orang, atau entitas lainnya) atas suatu kejadian (misalnya transaksi, atau perubahan). Oleh karenanya data harus dapat menggambarkan dengan tepat objek atau kejadian yang diwakilinya.

Agar dapat dijadikan informasi, diperlukan pengolahan data (*data processing*). Data yang baik dan terpercaya, apabila diolah dengan baik juga akan menghasilkan informasi yang baik. Kegiatan pengolahan data dari suatu perusahaan ke perusahaan lain tidak harus selalu sama, karena adanya perbedaan proses pembuatan keputusan di masing-masing perusahaan.

Kegiatan pengolahan data meliputi sebagian atau semua langkah berikut ini:

- a. Menghitung secara aritmatika (misalnya mengalikan, membagi, menambah, mengurangi, bila perlu membulatkan atau menghilangkan pecahan).
- b. Menghitung secara statistik (misalnya menghitung rata-rata, mencari bilangan terkecil, mencari standar deviasi, dan melakukan pecahan)
- c. Mengurutkan, mengelompokkan, memilah-milah, dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

2.2 Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Di era reformasi keuangan daerah saat ini, sistem keuangan daerah yang digunakan mengarah pada akuntansi. Hal ini disebabkan karena tata buku tidak mampu menghasilkan informasi sebagaimana dituntut oleh peraturan yang berlaku di era reformasi. Oleh karena itu, pergeseran dari tata buku menuju akuntansi dalam manajemen keuangan daerah merupakan sesuatu yang perlu direspons.

Menurut Abdul Halim (2012) menyatakan bahwa: **Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi(keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.**

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010) menyatakan bahwa: **Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.**

Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); Badan Pengawas Keuangan;

Investor; ¹⁸Kreditur; dan Donatur; Analisis ekononmi; dan pemerhati pemerintah daerah; rakyat; pemerintah daerah lain; dan pemerintah pusat; yang kesemuanya ada dalam ¹⁹lingkungan akuntansi keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan.

2.2.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik telah mencul akhir-akhir ini. Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari akuntansi, mulai dirasa penting dalam pengajaran akuntansi di perguruan tinggi. Sebelumnya, pembahasan akuntansi sektor publik ini dipersempit dan lebih dikenal sebagai akuntansi pemerintah.

Lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik

³Abdul, Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012

⁴Bastian Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat, 2010

Di Indonesia, Akuntans Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama yaitu:

- a. Akuntansi Pemerintah Pusat
- b. Akuntansi Pemerintah Daerah
- c. Akuntansi Partai Politik
- d. Akuntansi LSM
- e. Akuntansi Yayasan
- f. Akuntansi Pendidikan, Sekolah, Perguruan Tinggi
- g. Akuntansi Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit
- h. Akuntansi Tempat Peribadatan: Masjid, Gereja, Vihara, dan Pura

2.2.2 Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik.

A. Perencanaan Publik

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat dimasa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1). Proses perencanaan yang dilaksanakan ini akan menentukan aktivitas dan focus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya,

perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas dan diterimanya arah serta tujuan organisasi.

B. Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU No 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi, Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

C. Realisasi Anggaran Publik

Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

D. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan mengandung arti proses, cara, tindakan mengadakan atau proses, cara, tindakan menyediakan sesuatu..Sedangkan barang berarti benda yang berwujud. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik.

E. Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

F. Audit Sektor Publik

Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pengelolaan asset negara lainnya, atau organisasi publik nonpemerintah seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan.

Dalam menyusun laporan akuntansi sektor publik diperlukan teknologi untuk mempercepat proses pelaporan keuangan yang ada pada dinas.

2.3 Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi begitu cepat dan semakin marak di negara kita. Hal ini memungkinkan seseorang melakukan komunikasi ke berbagai belahan dunia dengan cepat dan efisien. Kehadiran teknologi mempunyai efek hampir ke setiap perikehidupan.

Menurut Djoko Purwanto mengemukakan:

Teknologi informasi adalah suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa (*engineering*), serta teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memroses informasi, aplikasi komputer dan

interaksinya dengan manusia, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Teknologi informasi adalah pendukung aktivitas sumber daya manusia dalam mengerjakan tugasnya secara efisien dan efektif. Dalam organisasi, kualitas sumber dan teknologi informasi sangat berkaitan. Apabila sumber daya manusia mempunyai kualitas yang baik, maka sumber daya manusia tersebut dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, sehingga laporan keuangan daerah dapat disajikan dengan tepat waktu. Dalam penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu, teknologi informasi merupakan sarana yang paling penting untuk menyelesaikan tugas dan fungsi dengan tepat waktu.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu cara sumber daya manusia menggunakan teknologi informasi yang ada oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh para ahli individu yang mampu dalam mengoperasikan teknologi informasi, secara langsung berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi maupun kinerja individu yang bersangkutan, sehingga menghasilkan penyajian laporan keuangan dengan tepat waktu.²⁰

2.4 Pelaporan Keuangan Daerah

2.4.1 Pengertian Pelaporan Keuangan

⁵ Djoko, Purwanto, *Komunikasi Bisnis*, Erlangga: Jakarta, 2011

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.

Menurut Indra Bastian (2010) mengemukakan:

Pelaporan Keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu. Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya

- d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.
- e. Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya, jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Menurut Catrianisari (2006) Menyatakan

Bahwa pelaporan keuangan merupakan cara lain dari laporan keuangan untuk menyampaikan informasi-informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut.

Pelaporan keuangan mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan. Apabila laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi keuangan, maka dalam pelaporan keuangan tidak hanya laporan keuangan tetapi semua informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber daya perusahaan, hutang, *earnings*, dan sebagainya. Unsur utama dalam pelaporan keuangan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan akhir dari proses akuntansi yang dirancang untuk memberikan informasi kepada calon investor, calon kreditur, pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis. Bagi pihak manajemen pelaporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menetapkan rencana kegiatan perusahaan untuk periode yang akan datang.

Dari beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya tentang pelaporan keuangan, maka peneliti menilai bahwa pelaporan keuangan adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber dayayang ada dalam organisasi.Hal yang disajikan dalam pelaporan keuangan akan dijadikan dasar pengambilah keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatifnya yang diantaranya adalah ketepatanwaktuan dan relevansi.Selain itu, pelaporan keuangan apabila diungkapkan tepat waktu maka sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan.Dalam sektor publik, pelaporan keuangan merupakan media pertangpgungjawaban terhadap masyarakat atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah.

2.4.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan(*stakeholders*), tentang kondisi keuangan pemerintah(Indriasari dan Ertambang 2007).Dengan diberlakukannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara(UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan UU No 15 tentang pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara),pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.Badan Pemeriksaan Keuangan

(BPK) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Jika pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

Pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan keuangan (pemeriksaan atas laporan keuangan), pemeriksaan kinerja (pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomis dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas) dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

a. Pengertian Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Informasi ini sangat berguna sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan untuk masa yang akan datang berdasarkan data historis dari laporan keuangan.

b. Pengertian Akuntansi Keuangan

Akuntansi Keuangan adalah merupakan salah satu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak

eksternal berupa laporan neraca, rugi laba, Perubahan Modal dan Arus Kas kepada pemegang saham, kreditor atau investor khususnya tentang profitabilitas dan kredibilitas perusahaan, kepada supplier, dan pemerintah.

A. Entitas Pelaporan

Salamun(2007) menyatakan bahwa unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan disebut sebagai entitas akuntansi. Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan Entitas Pelaporan. Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan disebut sebagai entitas Pelaporan. Jadi, laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Pelaporan merupakan gabungan dari laporan keuangan beberapa Entitas Akuntansi. Disebutkan bahwa dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas suatu entitas pelaporan terhadap asset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Salamun (2007) menyatakan untuk meningkatkan keterandalan laporan keuangan dan kinerja, setiap Entitas pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Sistem Pengendalian Intern ini harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang

diakuntasikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntasikan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Aparat pengawas intern pada pemerintah daerah melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak terikat.

B. Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Di dalam buku Indra Bastian (2010) berdasarkan tahapan dalam siklus akuntansi sektor publik, teknik pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari tiga tahapan berikut:

a. Tahapan Pencatatan

Didalam Tahapan Pencatatan meliputi beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pelaporan keuangan sektor publik.

1. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan
2. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal
3. Memindahkan bukukan (*posting*) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar

b. Tahapan Pengiktisarian

Didalam Tahapan Pengiktisarian meliputi beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pelaporan keuangan sektor publik

1. Penyusunan Neraca Saldo (*Trial Balance*) berdasarkan akun buku besar
2. Pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian
3. Penyusunan Kertas Kerja atau Neraca Lajur(Worksheet)

c. Tahap Pelaporan

Didalam Tahapan Pelaporan meliputi beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pelaporan keuangan sektor publik

1. Laporan Pada Unit Kerja Organisasi
2. Laporan Konsiliasi Organisasi

C. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut PP No 71 Tahun 2010 Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya kewajiban yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

A. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

B. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

C. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

D. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

E. Keseimbangan Antargenerasi(intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- A. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah

- B. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- C. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- D. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- E. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- F. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- G. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- A. ASET
- B. KEWAJIBAN
- C. EKUITAS DANA
- D. PENDAPATAN
- E. BELANJA
- F. TRANSFER
- G. PEMBIAYAAN, DAN
- H. ARUS KAS

Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

- A. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
- B. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
- C. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan
- D. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional
- E. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

D. Komponen-komponen Dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh menjadi sebagai berikut:

- A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/deficit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat, sesuai dengan anggarannya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal(saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggran(SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas laporan keuangan

C. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Penggunaan laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan LO dan beban untuk menjalankan suatu unit seluruh entitas pemerintahan.Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan

2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila deficit operasional), dan peningkatan ekuitas(bila surplus operasional).

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

E. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan nonlancar serta

mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

F. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

2.5 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Lestari dan Zulaikha (2007) menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini banyak memberikan kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi dan teknologi informasi merujuk pada teknologi yang digunakan dalam menyampaikan maupun mengolah informasi.

Handayani (2007) menyatakan bahwa penggunaan teknologi akan sangat berpengaruh penting terhadap akuntansi. Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi diharapkan dapat menjadikan pencatatan transaksi dengan lebih cepat terutama berkaitan dengan transaksi yang jumlahnya sangat banyak dan kompleks. Teknologi informasi membantu mengumpulkan database transaksi dengan lebih mudah cepat sehingga menunjang pelaporan yang lebih cepat pula.

Indriasari dan Ertambang (2007) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam sektor publik akan berdampak terhadap cara kerja aparat pemerintah. Penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dari proses penyusunan pelaporan keuangan.

Teknologi informasi dalam penelitian ini adalah semua aspek yang berkaitan dengan perubahan cara kerja dari yang semula dilakukan secara manual menuju sistem yang terkomputerisasi. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel independen dan dependen. Dari penjelasan diatas, maka dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

GAMBAR 2.1 Kerangka Pemikiran

X = Pemanfaatan Teknologi Informasi

Y = Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

→ = Hubungan Antar Variabel

Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah sebagai variabel bebas (Variabel Independen), sedangkan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan adalah sebagai variabel terikat (variabel dependen).

2.7 Hipotesis

Peranan hipotesis dalam penelitian ini adalah antara lain memberikan pedoman dan pengarahan pada penelitian dan pemecahan permasalahan, membatasi data informasi yang relevan dan betul-betul perlu saja serta mengurangi kesalahan di dalam kumpulan data Berdasarkan kerangka uraian dan pemikiran yang dikemukakan di atas, maka penulis membuat hipotesis adalah :

H₀ : Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Dinas Sosial Sumatera Utara.

H₁ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Dinas Sosial Sumatera Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, dimana dan kapan penelitian itu dilakukan. Suatu objek penelitian juga merupakan suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor, atau ukuran yang berbeda.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada dinas sosial Sumatera Utara.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Menurut Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni Bahwa: “**Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti dan terdiri dari sejumlah individu, baik yang terbatas (*finite*) maupun tidak terbatas (*infinite*).**²¹

6.Ibid ,

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah para pekerja yang ada pada Dinas Sosial Sumatera Utara. Jumlah populasi dari penelitian ini berjumlah 30.

3.2.2 Sampel

Menurut Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni bahwa: “ **Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi**”

Dalam penelitian ini, peneliti langsung meneliti semua pegawai yang ada di Dinas Sosial Sumatera Utara, yaitu sebanyak 30 orang responden. Jumlah populasi yang relatif kecil atau kurang dari 100, maka peneliti tidak perlu menarik sampel dari populasi tersebut, populasi tersebut dapat langsung dijadikan sebagai unit observasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel, yaitu *purposive sampling method*. *Purposive sampling method* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD.⁷

7. *ibid*

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer (*primary data*)

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari sumber pertama, berupa kumulatif, dan masih perlu diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa opini dan informasi dari responden yang diperoleh dengan memberikan kuisioner yang telah disusun kepada responden.

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa: **“Kueisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.”**⁸

Kuisioner akan diberikan secara langsung kepada responden sehingga peneliti dapat menjelaskan mengenai penelitian yang akan dilakukan serta cara pengisian kuisioner. Kesibukan yang dimiliki responden menyebabkan responden memerlukan waktu yang tidak singkat untuk melakukan pengisian kuisioner. Hal ini mengharuskan peneliti untuk memberikan waktu kepada responden untuk melakukan pengisian kuisioner.

8.Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik**, Edisi Revisi , Cetakan Keempatbelas: Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 194

2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dan objektif untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data serta berbagai keterangan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua metode, yaitu :

1. Penelitian Perpustakaan

Menurut Mardalis bahwa: **“Penelitian Perpustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah lain-lainya.”**⁹

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penulisan melalui buku-buku teori, artikel dan catatan kuliah yang relevan

9. Mardalis, **Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Ketigabelas : Bumi Aksara , Jakarta, 2014

dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kerangka dasar teori yang kuat untuk memahami bahan penulisan, karena tanpa dasar teori yang kuat maka objek yang diteliti akan sulit untuk dianalisis.

2. Penelitian Lapangan

. Menurut Mardalis bahwa: **“Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah kehidupan masyarakat”**.¹⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu metode pengumpulan dan analisis data yang berupa opini dari subjek yang diteliti (responden) melalui tanya-jawab. Metode survei dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui kuisisioner (pertanyaan tertulis) dan wawancara (pertanyaan lisan). Pengumpulan data dalam penelitian ini akan mengkomunikasikan kuisisioner secara langsung kepada responden.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisisioner (angket), yaitu memberikan pertanyaan kepada sampel (responden) yang mengatur indikator variabel bebas dan terikat. Kuisisioner yang digunakan oleh peneliti bersifat tertutup dengan menggunakan skala likert.

Cara mengerjakan skala likert adalah :

¹⁰ **Ibid**

- a. Mengumpulkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Responden diwajibkan memilih salah satu dari sejumlah kategori jawaban yang tersedia.
- b. Membuat nilai total untuk setiap responden dengan menjumlahkan nilai untuk seluruh jawaban.
- c. Menilai kekompakan antar pertanyaan. Caranya dengan membandingkan jawaban antar dua responden yang mempunyai skor total yang sangat berbeda, tetapi memberikan jawaban yang sama untuk pertanyaan tertentu. Pertanyaan tersebut dinilai tidak baik, harus dikeluarkan (tidak digunakan untuk mengukur konsep yang diteliti)
- d. Pernyataan yang kompak dijumlahkan untuk membentuk variabel baru dengan menggunakan teknik *summated rating*.

TABEL 3.1 Variabel, Dimensi, dan Indikator

Peneliti terdahulu susilo prapto

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Ukuran
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan teknologi suatu cara sumber daya manusia menggunakan teknologi informasi yang ada oleh pengguna	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan internet telah terpasang di unit kerja anda - Jaringan internet telah dimanfaatkan 	skala likert

	<p>sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien.</p>	<p>sebagai penghubung antar unit kerja pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur - Peralatan yang using/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya 	
--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintergrasi - Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. 	
Ketepatanwaktuan	Informasi harus disajikan tepat waktu sesuai kebutuhan pada saat pengambilan keputusan. Informasi tersebut harus siap digunakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta. - Laporan-laporan sering disediakan secara sistematis dan teratur, misal: laporan harian, laporan mingguan, laporan 	skala likert

		<p>bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan</p> <p>- Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur</p> <p>a. Laporan realisasi semester pertama</p> <p>b. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD</p> <p>c. Neraca</p> <p>d. Catatan atas laporan keuangan</p>	
--	--	---	--

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Dengan skala pengukuran ini, maka variabel yang diukur dengan instrument tertentu dapat dilakukan dengan angka, sehingga dapat lebih akurat, efisien dan komunikatif. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Penulis memperoleh langsung data-data yang dibutuhkan berdasarkan dari keterangan dan informasi yang diberikan responden melalui angket (kuisisioner) yang telah disebar dengan metode skor. Kuisisioner yang akan diberikan kepada responden terdiri dari 10 pertanyaan.

Pemberian skor ini digunakan sistem skala lima, yaitu :

- a. Sangat setuju (ST) : diberi skor 5
- b. Setuju (S) : diberi skor 4
- c. Kurang Setuju (KS) : diberi skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) : diberi skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju : diberi skor 1

3.6 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah ada, maka digunakan metode analisis sebagai berikut:

3.6.1 Metode Deskriptif

Menurut Mudrajad Kuncoro **”Penelitian deskriptif yaitu meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.”**¹¹

Tipe paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur.

3.6.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menghitung nilai koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear sederhana dipergunakan karena variabel terikat yang dicari dipengaruhi oleh hanya satu variabel bebas dan variabel penjelas.

Model regresi linear sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

¹¹Mudrajad Kuncoro, **Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis**, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2009.

Keterangan :

Y = Variabel dependen/ Kinerja individu

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = variabel independen/ sistem informasi akuntansi

E = error (tingkat kesalahan)

3.6.3 Uji Validitas

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner sebagai instrument penelitian dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan melalui perhitungan koefisien korelasi (*pearson correlation*).

Validitas instrument ditentukan dengan cara mengkorelasikan antara skor yang diperoleh masing-masing butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor total. Instrumen dapat dinyatakan valid apabila hasil perhitungan koefisien korelasi menunjukkan koefisien korelasi 0,3 atau lebih. Instrument penelitian juga dapat dinyatakan valid jika tingkat signifikannya berada di bawah $\alpha = 0,05$

Pada pengujian validitas data, memiliki kriteria sebagai berikut :

Jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ maka dinyatakan bahwa Data tersebut Valid

Jika $R_{hitung} < R_{tabel}$ maka dinyatakan bahwa Data tersebut Tidak Valid

3.6.4 Reliabilitas

Reliabilitas suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrument yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari suatu pengukur. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* suatu item dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan simetris tidaknya distribusi data. Uji normalitas akan di deteksi melalui analisa grafis yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS.

Dasar pengambilan keputusan yaitu :

- Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- Jika tidak menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas

Hasil penelitian yang representif dapat dihasilkan melalui uji regresi linear yang telah memenuhi beberapa asumsi dasar klasik sebagai berikut :

a. Uji Normalis Data

Uji normalis bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Pengujian normalitas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Melihat *Normal Probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Data sesungguhnya diplotkan sedangkan distribusi normal akan membentuk garis diagonal.
- ❖ Kriteria uji normalitas :
 - Apabila p-value (P_v) < (0,05) artinya data tidak berdistribusi normal.
 - Apabila p-value (P_v) > (0,05) artinya data berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah masing-masing kesalahan pengganggu mempunyai varian yang berlainan. Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman. Jika pengujian menghasilkan nilai lebih besar dari 0,05 (5 %) maka persamaan regresi tidak mengandung Heteroskedastisitas.

3.8 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

a. Uji t (*Partial Individual Test*)

Uji t dilakukan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian dilakukan dengan membandingkan *hitung t* dengan *table t*. criteria pengujian dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 akan ditolak dan H_1 akan diterima, artinya variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 akan diterima dan H_1 akan ditolak, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

b. Nilai R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi parsial (R^2) digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi parsial terletak antara -1 hingga +1. Nilai R^2 yang mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang erat antara variabel independen dengan variabel dependen.

Sedangkan nilai R^2 yang mendekati +1 menunjukkan semakin erat hubungan positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai R^2 parsial yang semakin mendekati angka nol menunjukkan kekuatan hubungan yang semakin lemah antara kedua variabel.